

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang masih dalam tahap pembangunan, banyak permasalahan di Indonesia terutama adalah kependudukan, serta pengangguran. Permasalahan itu semua tidak bisa terlepas dari masalah ketenagakerjaan dimana saat permasalahan ketenagakerjaan meningkat maka jumlah penduduk juga meningkat yang mengakibatkan banyaknya pengangguran.

Jumlah penduduk sangat mempengaruhi dalam dinamika pembangunan, jika jumlah penduduk yang tidak memadai akan menjadi pengaruh pada pendorong perkembangan ekonomi, ataupun sebaliknya. Perkembangan ekonomi juga sebagai suatu proses kenaikan pendapatan penduduk suatu Negara.

Ketenagakerjaan persoalan penting di negara yang masi berkembang ini. Perkembangan pasar global yang berkembang pesat, sehingga tenaga kerja yang berkualitas memiliki peran penting yang dibutuhkan negara untuk memajukan nilai perekonomian. Kesempatan kerja menjadi sebuah faktor penting dalam memajukan perkembangan ekonomi, Dengan adanya sebuah

pekerjaan maka upah atau gaji akan timbul. Upah atau gaji ditentukan di setiap Provinsi oleh pemerintah melalui Upah Minimum Provinsi (UMP).

Upah yang diterima harapannya mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Seiring pertumbuhan ekonomi, masyarakat berharap dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan menambah angkatan kerja. Dari sisi pendapatan riil perkapita, pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada distribusi pendapatan.

Negara berkembang sendiri pembangunan ekonomi harus terus dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang semakin meningkat, pendapatan yang merata, serta dapat mengurangi perbedaan antar wilayah dan membentuk perekonomian yang seimbang. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi dengan adanya industrialisasi yang membuka lapangan pekerjaan.

Proses pembangunan tidak hanya ditentukan dengan aspek ekonomi saja tapi pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembangunan suatu Negara dan wilayah di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa target utama dalam rencana pembangunan suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.

Target pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki variasi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu Negara, jika pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi kesejahteraan masyarakat juga dapat ditingkatkan. Tujuan agar nantinya segala aspek pembangunan dapat tersebar dengan merata terutama

ketenagakerjaan, menuntut pemerintah untuk mampu menyediakan lapangan kerja dengan jumlah dan kualitas yang sesuai.<sup>1</sup>

Produktivitas tenaga kerja memiliki faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat upah. Tingkat upah itu sendiri dalam kelancaran sebuah perusahaan memainkan peran yang sangat penting dalam fakta bahwa sistem perekrutan yang baik akan menjadi salah satu penggerak produktivitas dengan cara yang optimal dan juga dapat membantu meningkatkan standar hidup yang layak bagi tenaga kerja dengan pendapatan yang memadai.<sup>2</sup>

Faktor internal pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat upah dan pendidikan yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, ada dua faktor penting yang dalam beberapa tahun belakangan selalu mengalami perubahan yaitu upah minimum dan pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup> Salah satu komponen penting dari upah buruh adalah efisiensi pasar tenaga kerja; penurunan upah tenaga kerja berdampak pada penurunan biaya produksi.

Upah dapat dipahami sebagai bentuk kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan, dan pengusaha memberikannya upah, seperti timbal balik yang dilakukan pengusaha terhadap pekerjanya.<sup>4</sup> Upah adalah salah satu cara yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

---

<sup>1</sup> M.F. Alexandi and Ovilla Marshafeni, "Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Dan Sektor Jasa Pasca Kebijakan Upah Minimum Di Provinsi Banten", *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 10 No. 2 (Juli 2013), hlm.71–80.

<sup>2</sup> Nashahta Ardhiaty Nurfiat and Surya Dewi Rustariyuni, "Pengaruh Upah Dan Teknologi Terhadap Produktivitas Dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kota Denpasar", *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol.14, No. 1 (Agustus 2018), hlm. 34.

<sup>3</sup> Trisha Ananda, Harlen, and Lapeti Sari, "Analisis Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Economica*, Vol 11, No. 1 (April 2023), hlm 5.

<sup>4</sup> Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 80.

Penetapan upah dapat dikategorikan menjadi aspek penting yang perlu dibenahi khususnya bagi Indonesia sebagai negara berkembang.<sup>5</sup> Pengusaha memberikan upah kepada pekerja sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan sebagai bentuk timbal balik atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau buruh atas pekerjaan yang mereka lakukan. Kebijakan upah minimum adalah salah satu aspek yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan telah secara luas diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia, Indonesia.<sup>6</sup>

Ketenagakerjaan yang sering menjadi permasalahan adalah tentang penetapan upah minimum. Pasal 1 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, upah adalah “hak pekerja/buruh yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh berupa upah yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Penyerapan tenaga kerja juga tidak lepas dari peranan pemerintah sebagai penyusun kebijakan untuk mendukung investasi yang baik, standar pendapatan untuk kesejahteraan tenaga kerja dan strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.<sup>7</sup> Kebijakan

---

<sup>5</sup> Izzaty and Rafika Sari, “Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol 4, No. 2 (Maret 2013), hlm 131–145.

<sup>6</sup> Annisa Yulianti and Hadi Sasana, “Analisis Peningkatan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 10, No. 3, (Novemver 2021) hlm 97.

<sup>7</sup> Arifatul Chusna, “Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011,” *Economics Development Analysis Journal*, Vol 2, No. 3 (Agustus 2013), hlm 23.

pemerintah dalam menetapkan upah minimum menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal.

Upah minimum adalah “upah bulanan terendah, yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan gubernur sebagai jaring perlindungan” (Pasal 1 ayat (1) Permenaker No. 7 Tahun 2013). Rezim UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengembangkan formula untuk menghitung upah minimum. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Survey Hidup Layak (SHL) yang di lakukan setiap tahunnya menentukan pengupahan dan penetapan upah minimum. Namun, PP No. 78 Tahun 2015 ada perubahan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 mengubah formula perhitungan upah minimum.

Upah minimum adalah jumlah terendah bulanan yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawan untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ini dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang berdasarkan persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, yang mencakup tunjangan untuk karyawan dan keluarga mereka.<sup>8</sup>

Upah minimum adalah sistem hukum yang dibuat untuk mengatur keseimbangan antara kehidupan yang layak bagi pekerja dan kehidupan yang layak bagi pengusaha. Upah minimum juga berkorelasi dengan pertumbuhan

---

<sup>8</sup> Muhammad Sokian, Amri Amir, and Zamzami Zamzami, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kemiskinan Di Kabupaten Sarolangun,” *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol 15, No. 2 (Juli 2020), hlm 266.

ekonomi. Ini juga dapat menjadi sistem hukum yang dapat digunakan untuk mendorong produktivitas usaha dan menerapkan fokus keberpihakan pemerintah.<sup>9</sup>

Kebijakan upah minimum memiliki efek tersendiri yang membuat tingkat upah semakin tinggi yang mengharuskan Efek unik dari kebijakan upah minimum adalah meningkatkan tingkat upah yang diperlukan. Perusahaan mengikuti aturan yang dibuat pemerintah. Sehingga otomatis perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya<sup>10</sup>.

Provinsi Banten adalah salah satu wilayah otonom yang paling baru. Setelah era reformasi, ibu kota yang terletak di kota Serang memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, dan pemerintahnya menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi. Salah satu alasan keterlambatan pada awal masa pemerintahan adalah masa transisi dari sistem pemerintahan dan berbagai aspek lainnya, itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penundaan pada awal pemerintahan Provinsi Banten.

Banten juga telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, tidak hanya dalam ekonomi dan transportasi namun dari faktor produksipun memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, mengingat bahwa wilayah Banten itu sendiri sangat strategis karena hubungan maritim utama

---

<sup>9</sup> W Jemarut, Dkk “Penetapan Upah Minimum Dalam Perpektif Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Interpretasi*, Vol 4, No. 1 (April 2023), hlm 144.

<sup>10</sup> Imam Buchari, “Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015,” *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, Vol 11, No. 1 (April 2016), hlm 85.

antara pulau Jawa dan Sumatra juga karena banyaknya faktor yang mendukung.

Pertumbuhan ekonomi Banten yang melandai pada triwulan IV 2022 terutama akibat moderasi kinerja sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi, namun demikian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 Provinsi Banten tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2021 dilihat perbaikan kinerja beberapa sektor utama.

Peran sektor ekonomi dalam struktur PDRB Banten pada tahun 2022 tersebut secara berurutan yaitu Industri Pengolahan (pangsa 30,47%), Perdagangan Besar dan Eceran (12,52%), Konstruksi (12,21%), Transportasi dan Pergudangan (9,52%), dan Real Estate (8,07%). Sementara itu 27,21% tersebar dalam 12 (dua belas) lainnya. (Bank Indonesia). Jika sektor industri terus dikembangkan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat serta membantu perekonomian di daerah maupun nasional.<sup>11</sup> Sektor industri sebagai penyumbang PDRB yang cukup besar di Provinsi Banten dan Pulau Jawa.

Suatu wilayah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten juga secara konsisten terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 mencapai level 73,32. Sejak tahun 2015, status pembangunan Banten berubah dari kategori “Sedang” ( $60 < IPM < 70$ ) menjadi kategori “Tinggi” ( $70 < IPM < 80$ ).

---

<sup>11</sup> Fridho Handoyo, Ari Rudatin, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Banten,” *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, Vol 2, No. 1 (Desember 2023), hlm.109.

Angka tersebut mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten.

Perkembangan industri yang cepat akan mengakibatkan banyak tenaga kerja diserap, dan konsekuensi dari banyak masalah. Selain itu, yang akan dihadapi akan semakin beragam. Misalnya, masalah perekrutan dapat dilihat dari bagaimana pengusaha menanggapi kenaikan upah, terutama dalam hal pemberian upah minimum kepada pekerja.

Ketika suatu kondisi terjadi adanya perkembangan atau pertumbuhan perekonomian di suatu daerah maka bisa dilihat adanya daya beli atau tingginya tingkat pendapatan konsumen. Jika semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen akan membuat tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK meningkat. Meningkatnya UMP/UMK akan membuat banyak orang yang membuka usaha dan membuat banyaknya lapangan pekerjaan.

Pembangunan ekonomi dalam pengertian yang menjadi acuan ialah sebuah tahapan yang mengakibatkan peningkatan pendapatan per kapita penduduk dalam jangka yang panjang. Pengukuran ekonomi sebuah negara diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>12</sup> Melalui PDB dilakukan pengukuran aliran pemasukan serta pengeluaran pada ekonomi dengan jangka periode yang sudah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka peran sektor industri pengolahan semakin penting, sehingga sektor industri pengolahan mempunyai peranan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

sebagai sektor pemimpin (*Leading Sector*) di sektor industri secara umum.<sup>13</sup> Keadaan ini juga berlaku di Provinsi Banten. Bahwa Provinsi Banten memiliki banyak wilayah industri seperti Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang, maka seharusnya sektor industri mampu dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan sektor lainnya.

Namun, dalam proses pembangunan provinsi Banten, harus ada kekacauan dan dinamika yang akan menghalangi prosesnya. Pengangguran adalah salah satu masalah yang menghalangi proses pembangunan di Banten. Penurunan ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah pekerjaan yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang tersedia saat ini. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk bekerja dan menjalani kehidupan yang layak.”

Ketidak seimbangan antara permintaan dan ketersediaan tenaga kerja adalah salah satu masalah yang menyebabkan pekerjaan. Salah satu penyebab ketidaksetaraan ini di pasar adalah adanya ketidaksesuaian antara jumlah pekerjaan yang tersedia di Banten dengan kekuatan manusia yang ada. Ketidaksesuaian ini juga dapat disebabkan oleh adanya industri di Banten yang belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja lokal dan menggunakan tenaga kerja asing.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sayifullah Sayifullah, Ade Supriatna, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Di Provinsi Banten,” *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol 7, No. 2 (Desember 2017), hlm 5.

<sup>14</sup> D. Neka, S. Sentosa, dan H. Aimon, “Analisis Kesempatan Kerja Sektor Formal Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol 3, no. 6 (Desember 2015), hlm 10.

Provinsi Banten merupakan Provinsi yang mempunyai peranan sektor industri yang sangat penting bagi perekonomian daerah. Bisa dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap pendapatan daerah mencapai 56,54 persen dari pendapatan daerah Provinsi Banten sendiri. Pada tahun 2022 Banten menduduki urutan ketiga Provinsi yang menjadi penanaman modal asing, tapi pada kenyataannya menurut BPS 2023 Provinsi Banten mempunyai tingkat pengangguran paling tinggi mencapai 7,97 persen sekitar 486,360 jiwa melebihi jumlah pengangguran nasional.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis terdorong melakukan penelitian dengan judul “ **PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI DAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI BANTEN (UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten?
2. Faktor apa saja yang menjadi pengambat penyerapan tenaga kerja sektor industri Provinsi Banten?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang ingin di capai untuk mengetahui dan menganalisa secara jelas dan konkret :

1. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten

2. Untuk menganalisis Faktor apa saja yang menjadi pengambat penyerapan tenaga kerja sektor industri Provinsi Banten

#### **D. Manfaat penelitian**

Ada pun manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Manfaat Akademis

Harapan dari penelitian ini agar hasilnya bermanfaat kepada pembaca agar nantinya sebagai alat untuk mengetahui sumber informasi dalam menambah, memperluas serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh laju pertumbuhan sektor industri dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Banten.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian ini agar nantinya sebagai alat bagi pemerintah untuk berpartisipasi dalam kebijakan dalam mengatasi masalah tentang pertumbuhan sektor industri dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Banten.